

## Jerman Menentang Kebijakan Migrasi Yunani

**BERLIN (IM)**- Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer pada Rabu mengemukakan keras kebijakan migrasi Yunani. Pemerintah Yunani mengizinkan pengungsi yang diakui negara itu melakukan perjalanan ke Jerman.

"Mayoritas dari semua permohonan suaka (di Jerman berasal dari migran) yang telah mengajukan suaka di Yunani atau bahkan telah menerima perlindungan," kata Seehofer pada konferensi pers di Berlin tentang keadaan migran di Jerman.

"Kami memberi Yunani banyak bantuan kemanusiaan. Kami membantu lebih dari 3.000 pengungsi setelah kebakaran (di kamp pengungsi di Moria)," tambah pejabat Jerman.

Seehofer mengungkapkan, ia secara pribadi telah menegosiasikan kontrak dengan menteri migrasi Yunani yang menurutnya Athena akan menerima bantuan keuangan dari Jerman untuk memastikan bahwa akomodasi, perawatan, dan bantuan medis diberikan kepada para pengungsi di Yunani.

Jerman siap membayar 50 juta euro kepada Yunani. Namun menurut Seehofer, Athena belum menandatangani kontrak tersebut.

"Ini tidak bisa terus seperti itu! Penundaan apa pun tidak dapat ditoleransi!" seru menteri Jerman itu.

Sebagai akibat dari tingginya jumlah pengungsi yang diakui di Yunani yang mengajukan perlindungan lagi di Jerman, Kementerian Dalam Negeri Jerman sekarang sedang mengkaji kemungkinan mengontrol perbatasan untuk penerbangan dari Yunani.

"Itu akan menjadi tindakan yang sangat efektif, yang juga akan saya ambil jika kita tidak melakukan pendekatan yang sama dengan Yunani," kata Seehofer.

Menurut laporan media, sudah ada lonjakan permohonan suaka dari pengungsi yang diakui dari Yunani. ● gul

## AS Minta Korut tak Bersikap Ceroboh

**NEWYORK (IM)** - Amerika Serikat (AS) mengemukakan uji coba rudal Korea Utara (Korut) baru-baru ini. Mereka mengatakan, kecanggihan teknis Pyongyang menunjukkan pentingnya kebutuhan untuk meningkatkan implementasi sanksi-sanksi PBB pada program rudal, misal dan aktivitas ekonomi Korut.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak Korut untuk menghentikan 'provokasi ceroboh' yang mendorong resolusi sanksi-sanksi Dewan Keamanan PBB. Ia mengatakan Korut harus segera memulai kembali negosiasi dengan pemerintah Presiden Joe Biden tanpa syarat untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korut.

Ia mendesak semua negara mengimplementasikan sepenuhnya sanksi-sanksi PBB. "Sehingga kami dapat mencegah DPRK (Korut) mengakses dana, teknologi, cara yang diperlukan untuk mengembangkan lebih jauh senjata penghancur massal dan program rudal balistik ilegal," katanya, Rabu (21/10).

Sebelum rapat darurat Dewan Keamanan PBB mengenai uji coba rudal Korut terbaru Thomas-Greenfield kembali menegaskan AS sudah menawarkan pemerintah Korut untuk berdialog. "Dan kami telah menjelaskan kami tidak berniat memusuh DPRK," katanya.

Thomas-Greenfield mengatakan pemerintah Biden berkomitmen bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk mengurangi ketegangan dan menjaga perdamaian di Semenanjung Korea. Ia menambahkan komitmen AS mempertahankan Korea Selatan dan Jepang 'sangat kuat'.

Ia mengkritik komite pemantau sanksi Korut Dewan Keamanan PBB. "Mereka tidak melakukan pekerjaannya," kata Thomas-Greenfield. "Kami harus menegakkan pelanggaran-pelanggaran ini, kami harus meningkatkan implementasi sanksi-sanksi dan kami tidak melakukannya, dan terutama kami harus fokus pada mereka yang melanggar sanksi," tambahnya.

Duta Besar AS tersebut tidak menyebutkan negara mana pun. Tapi panel pakar pemantau implementasi sanksi Korut mengutip pelanggaran dilakukan tetangga negara itu yakni Rusia dan Tiongkok. ● ans

## PERESMIAN RIYADH SEASON DI RIYADH - ARAB SAUDI

Para model terlihat saat upacara peresmian Riyadh Season di Riyadh, Arab Saudi, Rabu (20/10).

## Selandia Baru Lantik Gubernur Jenderal Wanita Maori Pertama

**WELLINGTON (IM)**- Selandia Baru lantik Gubernur Jenderal perempuan Māori pertama, Dame Cindy Kiro dalam upacara yang digelar di parlemen di Wellington, Kamis (21/10). Ia berjanji untuk menyentuh imigran dan warga yang terpinggirkan.

Di pelantikan yang hanya dihadiri beberapa orang Cindy mengaku bangga memiliki warisan Maori dan Inggris. Gubernur Jenderal di bekas jajahan Inggris itu memiliki tugas konstitusional dan seremonial atas nama Kerajaan Britania Raya.

"Masyarakat berkembang tangguh ketika masyarakat merasa saling terhubung, memiliki rasa saling memiliki, dan memiliki tempat untuk berpijak," kata Dame Cindy dalam pidatonya.

"Saya akan menghubungkan imigran baru dan mantan pengungsi dan merayakan berbagai budaya dan agama yang diberikan pada bangsa kami yang memilih menjadikan Selandia Baru sebagai rumah mereka," tambahnya.

Banyak masyarakat Maori yang sekitar 17 persen dari populasi Selandia Baru yang mengalami kesulitan sosial dan ekonomi. Maori kerap menjadi masyarakat yang paling banyak mengalami masalah hukum dan kesehatan. Sebagian besar anak-anak mereka berakhir di panti yang dikelola negara. Pada tahun 2019 lalu ribuan Maori turun ke jalan menuntut keadilan sosial dan tanah adat.

Dame Cindy memiliki karir akademik dan pernah menduduki beberapa jabatan di universitas-universitas Selandia Baru. Ia memiliki PhD di bidang Kebijakan Sosial dan MBA di bidang bisnis administrasi dari University of Auckland dan Massey University.

Ia orang pertama di keluarganya yang berhasil masuk universitas. Perdana Menteri Jacinda Ardern menyambut penunjukan Dame Cindy dalam pidato pelantikan.

"Saya tahu sebagai perempuan Maori pertama yang memegang jabatan ini Anda sadar kesempatan Anda di sini juga memberi inspirasi bagi masyarakat luas dari berbagai lapisan masyarakat," katanya. ● gul



## UNJUK RASA KONFEDERASI SERIKAT BURUH KOREA

Pekerja dari Konfederasi Serikat Buruh Korea mengenakan alat pelindung diri lengkap untuk menghindari tertular penyakit virus corona (COVID-19) menghadiri protes untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, di Seoul, Korea Selatan, Rabu (20/10).

# Filipina Tinjau Ribuan Kasus Pembunuhan dalam Perang Narkoba

Filipina ditekan PBB selidiki dugaan pembunuhan sistematis terhadap tersangka narkoba.

**MANILA (IM)** - Kementerian Kehakiman Filipina akan meninjau ribuan kasus pembunuhan dalam operasi perang melawan narkoba dan obat terlarang (narkoba) di bawah kebijakan Presiden Rodrigo Duterte.

Departemen Kehakiman (DOJ) pada Rabu (20/10) merilis rincian tentang 52 kasus pembunuhan terhadap pengedar narkoba oleh polisi.

Filipina mendapat tekanan dari PBB untuk menyelidiki dugaan pembunuhan sistematis terhadap tersangka narkoba. Ketika ditanya oleh Reuters apakah Filipina akan memperluas penyelidikan ke dalam perang melawan narkoba, Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengatakan, pihaknya akan

mempertimbangkan. "Jika waktu dan sumber daya memungkinkan, DOJ akan meninjau ribuan kasus ini juga," ujar Guevarra.

Peninjauan kembali tersebut menandai bahwa negara melakukan pengakuan atas kemungkinan terjadi pelanggaran dalam kampanye anti-narkoba. Dalam beberapa kasus yang diselidiki DOJ, mereka yang tewas tidak memiliki jejak bubuk mesiu di tangan mereka, atau tidak memiliki senjata sama sekali. Artinya, mereka dihabisi dalam keadaan tak bersenjata.

Kementerian Kehakiman juga mengatakan, polisi telah menggunakan kekuatan berlebihan, dan menembak tersangka dari jarak dekat. Selain

itu, catatan medis yang relevan dan rekaman polisi telah hilang.

Kasus-kasus itu akan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Sementara, pengembangan kasus kemungkinan dapat berujung pada tuntutan pidana terhadap petugas.

Secara resmi, polisi telah membunuh lebih dari 6.000 orang dalam operasi melawan narkoba. Tetapi para aktivis mengatakan, ribuan pengguna narkoba lainnya terbunuh oleh orang-orang bersenjata misterius. Polisi telah membantah terlibat dalam kematian itu.

Sebelumnya, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet, telah mendesak Filipina untuk mempublikasikan temuannya terhadap 52 kasus pembunuhan dalam operasi perang melawan narkoba. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menyetujui penyelidikan resmi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Duterte dalam perang melawan narkoba.

Dalam sebuah pernyataan, ICC mengatakan para hakim telah menyetujui permintaan jaksa untuk menyelidiki dugaan pembunuhan semena-mena dalam kampanye antinarkoba Duterte. Hakim ICC menyampaikannya, kampanye perang melawan narkoba Duterte tidak dapat dilihat sebagai operasi penegakkan hukum yang sah, melainkan lebih mengarah pada serangan sistematis terhadap warga sipil.

"Duterte dan pengikutnya harus bertanggung jawab atas kejahatan ini," ujar keputusan ICC. Permintaan otorisasi untuk menyelidiki kasus terhadap Duterte diajukan 14 Juni lalu oleh Fatou Bensouda, yang saat itu menjabat sebagai kepala jaksa ICC. Kampanye anti narkoba merupakan salah satu program Duterte ketika menjabat sebagai presiden Filipina mulai 2016 lalu.

Saat itu, Duterte melancarkan penangkapan besar-besaran terhadap para pengedar dan pengguna narkoba dan

memberi kewenangan polisi untuk membunuh setiap anggota kriminal dan pengguna obat-obatan terlarang.

Pada 2018, Duterte memutuskan penarikan Filipina dari Statuta Roma. Penarikan tersebut mulai berlaku pada 17 Maret 2019. Sejak itu, Duterte telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama dalam penyelidikan ICC.

Duterte mengangap ICC tidak memiliki yurisdiksi di Filipina, karena negaranya telah keluar dari ICC. Namun, ICC mengatakan, pihaknya masih memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan Duterte sejak November 2011 hingga Maret 2019, yaitu periode ketika Filipina masih menandatangani Statuta Roma.

Filipina akan menggelar pemilihan presiden pada Mei 2022. Presiden Filipina hanya diizinkan berkuasa satu kali dengan masa jabatan enam tahun. Maka Duterte kini bersikap lengser. ● tom

## Anak-Anak Afghanistan Terjebak dalam Lingkaran Narkoba

**KABUL (IM)** - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, Afghanistan menghasilkan 80 persen pasokan opium di dunia. Di provinsi Badakhshan, diperkirakan ada 25.000 hingga 30.000 pecandu narkoba. Seperti di tempat-tempat lain, kecanduan cenderung membelenggu dalam keluarga.

Keluarga Jan Begum adalah salah satu di antaranya. Mereka tinggal di Kota Faizabad. Kedua putra dan suaminya kecanduan. Mereka menggunakan shabu dan heroin.

"Kami tidak punya apa-apa lagi. Baik suami maupun anak keduanya menganggur. Ayah pecandu, anak juga pecandu. Anak sulung saya tidak ada di sini. Dia menghilang sudah tiga tahun. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal," terang Jan.

"Ada empat dalam keluarga kami, dan kami berempong adalah pecandu. Ya, kami menjual semuanya. Kami menjual seprai dan semua yang kami miliki. Dan dengan uang itu, kami membeli narkoba dan menggunakannya," lanjutnya.

Dulu, keluarga Jan tinggal di sebuah rumah di Faizabad. Ketika pemilik rumah mengetahui bahwa keluarganya menggunakan narkoba, pemilik rumah mengusir mereka.

Sekarang, mereka mengemis, menjadi buruh cuci, dan menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk narkoba. Mereka telah dirawat beberapa kali karena kecanduan, tetapi kemudian kambuh.

Samiullah, 18 tahun, menggunakan narkoba bersama ibu, ayah, dan saudara laki-lakinya. "Saya menggunakan narkoba sejak kecil. Saya mengonsumsinya bersama orang tua saya. Saya keluar untuk mencari narkoba dan kemudian saya mengonsumsinya. Saya berharap pemerintah akan datang dan mengobati kami. Saya ingin bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel," katanya.

Afghanistan tetap menjadi

produsen opium terbesar di dunia. Di Provinsi Nangahar, anak-anak dan remaja bekerja di ladang opium mengumpulkan opium bersama orang tua mereka. Mereka membantu produksi opium. Mustafa, 16, menjadi salah satu remaja yang bekerja di ladang opium. Ia mengatakan mulai menuju kecanduan dalam waktu yang lama, karena dia bekerja di ladang opium. "Narkoba itu membuat kita mabok. Ketika kami mengumpulkan, kami menghirup, dan itu membuat kami pusing, membuat kami mabok, lalu kami akan duduk atau pulang dengan alasan untuk bersantai. Itu berdampak buruk," ujarnya.

"Saya mengalami sakit kepala ketika pergi ke sekolah. Saya mendapat izin untuk pulang. Opium memiliki efek yang sangat buruk karena membuat kepala seperti berputar, kami mabok. Opium menyebabkan kondisi seperti itu pada tubuh kita," lanjut Mustafa.

Kepada wartawan, ia menunjukkan sebagian hasil panen opium tahun ini. Beberapa kilogram opium telah dipanen dari ladang. Dia mengatakan bahwa setelah opium dipanen, opium dijual dan dia menyimpan dua kilogram untuk dijual kemudian. Ketika musim panen opium berakhir, dia bekerja di ladang untuk tanaman lain seperti bawang.

Mustafa mengatakan dia telah melihat banyak orang, termasuk perempuan, menjadi kecanduan narkoba setelah bekerja di ladang opium. Dia sendiri tidak ingin menjadi pecandu. "Kalau tidak ada narkoba yang ditanam di sini, mungkin tidak akan ada yang kecanduan narkoba. Opium membuat kami orang kecanduan. Kami ingin pemerintah menghentikan penanaman opium. Pemerintah harus membantu kami menanam pohon buah-buahan yang baik," tuturnya. ● gul

## Navalny Terima Penghargaan HAM Tertinggi dari UE

**BRUSSELS (IM)** -

Pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara Alexei Navalny dianugerahi penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi Uni Eropa (UE) pada Kamis (21/10). Penyerahan itu menjadi tamparan keras kepada Presiden Vladimir Putin dan pemerintahannya yang diduga meracuni serta menangkapnya.

Dalam memberikan Sakharov Prize kepada Navalny, Parlemen Eropa memuji keberanian pribadinya yang luar biasa. Aktivis berusia 45 tahun itu jatuh sakit karena racunan racun saraf tahun lalu dan sembuh di Jerman, kemudian segera ditangkap kembalinya ke Moskow dan kemudian dipenjara.

"Dia telah berkampanye secara konsisten melawan korupsi rezim Vladimir Putin, dan melalui akun media sosial dan kampanye politiknya, Navalny telah membantu mengungkap pelanggaran dan memobilisasi dukungan jutaan orang di seluruh Rusia. Untuk ini, dia diracun dan dijebloskan ke penjara," kata Presiden

parlemen David Sassoli dalam sebuah pernyataan.

Sassoli menyerukan pembebasan segera Navalny yang merupakan musuh domestik terbesar Putin. Istana Kremlin belum memberikan reaksi langsung terhadap penghargaan tersebut.

Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borell menyatakan hadiah itu adalah pengakuan atas komitmen Navalny untuk membela demokrasi di Rusia. Dia harus mengeluarkan biaya pribadi yang besar dalam perjalanannya.

Rekan utama Navalny, Leonid Volkov, mengatakan hadiah itu menunjukkan bahwa ratusan anggota parlemen dari berbagai negara dan partai setuju bahwa perang melawan korupsi adalah masalah bagi seluruh Eropa. Navalny adalah tahanan politik nomor satu di dunia dan tawanan pribadi Putin.

"Eropa memahami bahwa kami berjuang untuk menjadikan Rusia sebagai negara Eropa yang normal, yang akan menjadi, dan mendukungnya," kata Volkov dalam sebuah posting

di Facebook.

Anggota lain dari tim Navalny, Ruslan Shaveddinov, mengatakan pihak berwenang Rusia mungkin ingin masalah tokoh oposisi dilupakan sesegera mungkin. "Namun kami melihat bahwa politisi Eropa percaya bahwa masalah ini penting dan mengirim pesan yang cukup jelas bahwa tidak ada yang lupa dan bahwa mereka menuntut pembebasan Alexei Navalny," ujarnya.

Shaveddinov mengatakan rekan-rekan Navalny akan melakukan segala yang mungkin untuk memenangkan kebebasannya. Mereka akan melanjutkan penyelidikan anti-korupsi, kampanye, dan protes politik dan publik.

Penghargaan UE untuk HAM ini dinikmati dari pembangkang Uni Soviet Andrei Sakharov. Dia seorang pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan meninggal pada 1989. Penyelenggaraan dibuat pada 1988 untuk menghormati individu atau kelompok yang membela HAM dan kebebasan mendasar. ● ans



**OMBAK BESAR HANTAM TEMBOK PELABUHAN NEWHAVEN - BRITAIN**  
Ombak besar menghantam tembok pelabuhan di Newhaven, Britain, Rabu (20/10).